

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan suatu negara yang menerapkan sistem demokrasi dalam pemerintahannya. Sistem yang dianut dari awal kemerdekaan negara Indonesia hingga sekarang. Memang secara formal demokrasi merupakan dasar dari kebanyakan negara di dunia.¹ Namun sistem demokrasi yang diterapkan Indonesia cukuplah berbeda dengan demokrasi negara lain. Negara Indonesia menganut sistem demokrasi yang berdasarkan Pancasila. Walaupun dalam pelaksanaannya sendiri masih dalam taraf perkembangan dan mengenai sifat-sifat dan ciri-cirinya masih terdapat berbagai penafsiran dan pandangan. Pada perkembangannya di era reformasi ini, Indonesia sedang mengalami massa demokratisasi pada sistem politiknya. Sehingga kebebasan rakyat akan terbentuk serta kedaulatan rakyat juga dapat ditegakan.²

Dalam demokrasinya, rakyat sangatlah dilibatkan dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu partisipasi politik dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia sangatlah penting. Partisipasi politik seluruh rakyat Indonesia yang tidak dibatasi oleh umur, ras, atau *gender* sekalipun. Maka dari itu partisipasi politik menjadi hal yang *plural* selama seseorang itu memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Namun dalam

¹ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik : Edisi Revisi*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, Hlm. 105

² Ibid., hlm. 134

pelaksanaannya di Indonesia, partisipasi politik yang terjadi masih terkesan hanya milik beberapa golongan saja. Contohnya saja masih ada anggapan bahwa politik hanyalah milik kaum laki-laki. Harus diakui bahwa meski sudah banyak tokoh perempuan yang sukses, namun pada sisi lain masih banyak pula hambatan yang dialami kaum perempuan untuk tampil dalam sektor publik. Misalnya, terkait Aktivitas perempuan dalam politik, hampir di seluruh negara, khususnya di negara berkembang, menghadapi sejumlah kendala baik struktural maupun kultural.

Kendala struktural tersebut sering kali berkaitan dengan permasalahan pendidikan, status sosial, ekonomi, dan pekerjaan. Pekerjaan perempuan masih sering diidentikkan dengan pekerjaan “kelas dua” yang sulit berimbang dengan laki-laki. Sementara kendala kultural terkait dengan faktor budaya dalam masyarakat seperti menempatkan perempuan sebagai untuk sekedar tinggal di rumah. Kini konsep kesetaraan gender dianggap sebagai sebuah jawaban untuk mengatasi persoalan perempuan tersebut. Gerakan ini sudah berkembang menjadi gerakan massal yang sangat berpengaruh.³

Reformasi yang dialami bangsa Indonesia pada tahun 1998 membawa perubahan pada sistem politik terutama sistem Pemilu. Perubahan ini membuka peluang bagi setiap elemen bangsa untuk terlibat di dalamnya, menuju kehidupan demokrasi yang lebih baik. Bagi kaum perempuan di Indonesia, perubahan sistem politik itu juga memberi harapan bagi mereka untuk dapat memperjuangkan kepentingannya dengan lebih nyata. Perubahan dalam sistem Pemilu antara lain, diberlakukannya UU No. 12 Tahun 2003 merupakan Legitimasi kuota 30% bagi

³ Asian bank, “Kesetaraan Gender Dalam Pekerjaan”, diakses dari <http://www.asiandevbank.org>, pada tanggal 28 April 2016 pukul 22:20

keterwakilan perempuan sebagai caleg dari partai politik, dan jumlah partai politik peserta Pemilu tidak lagi dibatasi sehingga ada partai politik yang mengatasnamakan kaum perempuan Indonesia. Bahkan sudah diatur juga dalam UU No 8 Tahun 2012 tentang keterwakilan kaum perempuan dalam politik yang mewajibkan setiap partai politik melibatkan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan di dalamnya.

Kuota anggota legislatif perempuan sekurang-kurangnya 30% di partai politik dan parlemen, merupakan kebijakan yang positif bagi pemberdayaan partisipasi politik perempuan. Jumlah pemilih dalam Pemilu 2004 lebih dari 51% nya adalah perempuan. Seharusnya, idealnya kaum perempuan secara struktural memiliki kesempatan lebih besar untuk menjadi politisi, dibandingkan pada Pemilu sebelumnya. Namun kenyataannya tidaklah demikian, contohnya saja di Kota Bogor. Keterwakilan perempuan di Kota Bogor sendiri tidaklah mencapai 30%, di Kota Bogor keterwakilan perempuan dalam dunia politik hanya mencapai angka 18% saja, hal ini dapat dilihat dari 24 orang anggota DPRD Kota Bogor, hanya 8 orang saja yang merupakan perwakilan perempuan. Hal ini disebabkan karena jalan bagi munculnya banyak politisi perempuan di Indonesia masih menghadapi banyak kendala. Baik dari kaum perempuan itu sendiri maupun kondisi *real* politik, dan sosial budaya yang acap kali belum mensupport keberadaannya di dunia politik.⁴

Upaya mencapai kuota minimum jumlah perempuan di parlemen tidak bisa dilepaskan dengan upaya peningkatan kualitas dari kaum perempuan itu sendiri. Tanpanya, kesempatan apapun yang diberikan melalui ketentuan untuk

⁴ Rahima, "*Perempuan Dalam Politik*", diakses dari <http://www.rahima.or.id>, pada 28 April 2016 pukul 20:00

memberikan ruang politik yang lebih luas lagi bagi perempuan, tidak akan menghasilkan perbaikan yang berarti. Dengan demikian, diperlukan upaya yang sistematis dan terprogram untuk meningkatkan kapasitas politik perempuan. Salah satu kendala untuk terlaksananya peningkatan kapasitas perempuan dalam arena politik masih adanya pandangan yang kuat di masyarakat yang menempatkan kaum perempuan hanya mengurus suami dan anak-anak. Aktivitas perempuan dipangung politik, di Indonesia dewasa ini masih merupakan sesuatu yang dianggap tabu.

Berawal dari permasalahan tersebut, muncullah banyak lembaga sosial yang menaruh perhatian lebih akan aktivitas perempuan dalam dunia politik. Salah satunya adalah Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) yang menaungi para aktivis politik perempuan untuk dapat lebih mengembangkan dirinya lagi sebagai upaya peningkatan kualitas diri. Bukan hanya sebagai suatu lembaga yang bergerak di lingkup Nasional saja, bahkan KPPI ini sudah mempunyai struktural yang sangat baik, mulai dari lingkup Nasional, Provinsi bahkan Kabupaten/Kota. Hal ini menunjukkan keseriusan KPPI dalam memberikan edukasi politik yang baik bagi para aktivis ataupun masyarakat awam sekalipun. Selain itu lembaga semacam ini dapat menjadi ajang tempat untuk berbagi informasi dan saling menyemangati agar lebih banyak lagi perempuan yang peduli dan mau terlibat dalam bidang politik.

Oleh karena itu, sangatlah menarik melihat dinamika politik perempuan yang berkembang saat ini. Serta Aktivitas-Aktivitas lembaga lainnya yang berusaha untuk memberikan pengetahuan tentang politik dan meningkatkan partisipasi politik perempuan agar tidak menjadi sosok yang apatis terhadap dunia politik.

1.2 Identifikasi masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat diidentifikasi permasalahan tersebut sebagai berikut :

- a. Mengapa perempuan harus meningkatkan kualitas dirinya sebelum terjun ke dunia politik?
- b. Bagaimana kondisi keterwakilan perempuan dalam dunia politik di Kota Bogor?
- c. Bagaimana aktivitas perempuan dalam dunia politik?
- d. Bagaimana aktivitas KPPI dalam meningkatkan partisipasi politik perempuan di Kota Bogor?
- e. Bagaimana pelaksanaan peraturan dalam meningkatkan partisipasi politik perempuan di Kota Bogor?

1.3 Pembatasan Masalah

Mengingat banyak akan luasnya cakupan penelitian ini, penelitian yang akan dilakukan adalah hanya mengenai masalah Aktivitas Kaukus Perempuan Politik Indonesia dalam meningkatkan partisipasi politik perempuan di Kota Bogor.

1.4 Pertanyaan Penelitian

Sesuai dengan pembatasan masalah tersebut di atas maka perumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini ialah **“Bagaimana Aktivitas Kaukus Perempuan Politik Indonesia dalam meningkatkan partisipasi politik perempuan di Kota Bogor?”**

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan data-data dan informasi secara empirik tentang aktivitas Kaukus Perempuan Politik Indonesia dalam meningkatkan partisipasi politik perempuan di Kota Bogor.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Adapun manfaat teoritisnya adalah menambah khasanah pengetahuan pada bidang ilmu sosial politik khususnya politik.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktisnya yaitu :

- Bagi masyarakat
 - Untuk menambah pengetahuan mengenai masalah partisipasi politik perempuan
 - Untuk mengingatkan kembali betapa pentingnya partisipasi politik perempuan untuk terlaksananya demokrasi yang baik
- Bagi Pemerintah
 - Untuk membuka pemikiran pemerintah mengenai pentingnya kesetaraan gender terutama dalam hal partisipasi politik perempuan
 - Untuk membuka pemikiran pemerintah mengenai pentingnya lembaga sosial seperti KPPI dalam meningkatkan partisipasi politik perempuan.

